

**BURUH DALAM SEJARAH INDONESIA: STUDI TENTANG AKTIVITAS BURUH
PADA MASA PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA PERIODE 1870-1942**

Danan Tricahyono
Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta
danan.tricahyono@student.uns.ac.id

Abstrak-Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perburuhan di Nusantara pada masa pemerintah kolonial Belanda pada periode 1870-1942. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan menggunakan buku serta artikel penelitian sebagai bahan referensi. Dari sistem tanam paksa ke penerapan undang-undang agraria posisi buruh bertransformasi dari pekerja rodi menjadi pekerja yang sifatnya kontrak. Memasuki awal abad 20 terjadi gerak tranformasi buruh. Arus urbanisasi berdampak pada bertambahnya jumlah buruh. Kondisi tersebut dapat menjadi ladang subur bagi perkembangnya revolusioner kiri. Para buruh banyak menuntut perbaikan nasib dalam hubungannya dengan pemberian upah yang layak. Memasuki masa depresi ekonomi 1930 para buruh mengalami nasib yang berbeda. Sebagian mengalami Putus Hubungan Kerja (PHK) dan penurunan upah. Guna mengatasi masalah tersebut diberikan beberapa solusi seperti pengumpulan dana yang digunakan untuk membuka lahan, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk membuka pelatihan bagi para petani serta ada inisiatif pendirian koperasi sebagai sarana menciptakan usaha-usaha ekonomi.

Kata kunci: *Sejarah, Buruh, Kolonial Belanda*

**LABORER IN INDONESIAN HISTORY: STUDY OF LABOR ACTIVITIES DURING
THE DUTCH COLONIAL RULE OF THE PERIOD 1870-1942**

Danan Tricahyono
Postgraduate, Sebelas Maret University
danan.tricahyono@student.uns.ac.id

Abstract-This study aims to analyze labor dynamics in the archipelago during the Dutch colonial government in the period 1870-1942. This research uses a literature study using books and research articles as reference material. From the system of forced cultivation to the application of agrarian laws, the position of workers has transformed from corpse workers to contract workers. Entering the early 20th century there was a movement of labor transformation. The current urbanization has an impact on increasing the number of workers. These conditions can become fertile ground for the development of the revolutionary left. The workers demand a lot of improvement in their fate in relation to the provision of decent wages. Entering the economic depression era of 1930 the workers experienced a different fate. Some of them experienced Termination of Employment (PHK) and decreased wages. In order to overcome this problem, several solutions were provided, such as raising funds to open land, to create jobs, to open training for farmers, and an initiative to establish cooperatives as a means of creating economic enterprises.

Keywords: *History, labor, Dutch colonial*

Pendahuluan

Pekerja merupakan orang yang bekerja kepada orang lain dan mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya. Dalam bahasa sehari-hari pekerja dibagi menjadi tiga yaitu pekerja kantor, pekerja kasar atau kuli, dan pekerja terampil (pekerja yang memiliki keterampilan tertentu misalnya tukang kayu) (Yuliati, 2012). Pekerja merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki eksistensi dalam perjalanan sejarah. Mengenai sejarah asal-usul buruh atau terbentuknya sarekat pekerja belum tentu setiap orang mengetahuinya. Maka dari itu topik penulisan buruh sangat menarik untuk ditulis. Eksistensi gerakan buruh di Indonesia dimulai sejak diterapkannya Sistem Tanam Paksa tahun 1830. Periode tersebut merupakan masa penting dalam sejarah buruh. Penerapan Sistem Tanam Paksa oleh pemerintah Kolonial Belanda mengubah sistem pertanian yang telah ada. Para pemilik lahan pertanian dipaksa bekerja rodi mengabdikan diri kepada pemerintah. Para petani bekerja sebagai buruh tani tanpa diberi upah. Buruh tani bekerja dalam ikatan feodalisme (Tim Nasional Penulisan Sejarah, 2010a).

Sistem feodalisme perlahan-lahan mulai hilang ketika pemerintah Kolonial Belanda menerapkan kebijakan baru yang dikenal sebagai Sistem Politik Pintu Terbuka (Liberal) tahun 1870. Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan kebijakan paket liberal, wujud dari paket liberal berupa dilakukannya pembukaan lahan perkebunan, pendirian pabrik, pembangunan infrastruktur, serta mengundang para investor asing untuk menanamkan modalnya di Nusantara. Kebijakan tersebut berdampak pada eksodus tenaga kerja (pekerja) untuk bekerja pada proyek-proyek pertanian, perkebunan dan infrastruktur. Guna mengatasi kekurangan tenaga kerja pemerintah Kolonial Belanda mencari tenaga kerja ke luar negeri (Iqbal, 2011).

Perkembangan ekonomi pada masa liberal cukup baik, ditandai dengan meningkatnya nilai ekspor pemerintah Kolonial Belanda, misalnya pada komoditi tembakau antara tahun 1870 sampai 1885. Tetapi, perkembangan tanaman perdagangan mulai seret setelah tahun 1885. Bahkan perdagangan tembakau mengalami penurunan yang drastis. Hal tersebut berdampak pada pengurangan upah pekerja yang berujung pada berkurangnya kesejahteraan pekerja (Daliman, 2012). Krisis pada tahun 1885 diperparah dengan penyakit yang menyerang tanaman perkebunan seperti tebu. Wabah penyakit pada tanaman secara perlahan-lahan membuat para kapitalis pergi dari bumi Nusantara. Para kapitalis merasa takut jika bisnisnya akan rugi. Melihat fenomena seperti itu pemerintah Belanda mengadakan evaluasi dan berupaya melakukan perbaikan sistem ekonomi. Usaha yang ditempuh dengan menerapkan kebijakan Politik Etis pada tahun 1900.

Politik Etis merupakan kebijakan yang diperjuangkan untuk mengadakan desentralisasi ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Tim Nasional Penulisan Sejarah, 2010b). Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan gagasan baru yang dikenal dengan *Trilogi Van Deventer* (Edukasi, Irigasi, dan Imigrasi). Rangkaian proses transformasi yang dilakukan pemerintah Kolonial Belanda melahirkan kesadaran kelas dalam struktur ekonomi masyarakat. Para pekerja mengalami proses radikalasi menentang pemerintah Kolonial Belanda. Munculnya paham komunisme di Uni Soviet secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan pekerja di Nusantara. Pemerintah Kolonial Belanda mulai mencurigai gerakan-gerakan buruh. Masifnya buruh dalam melakukan aksi mogok membuat pemerintah curiga jika aksi tersebut ditunggangi oleh kaum komunis. Salah satu buktinya pada tahun 1930 pemerintah kolonial membubarkan Sarekat Kaum Pekerja

Indonesia (SKBI) karena dicurigai sebagai pendukung gerakan kebangsaan (Iqbal, 2011).

Dampak pembersihan terhadap sarakat buruh membuat gerakan buruh tidak lagi bergaung dalam gerakan kebangsaan. Masuk periode pada penjajahan Jepang tahun 1942 nyaris tidak ada sarakat buruh yang mampu bertahan. Dari pemaparan tersebut, artikel ini akan mengantarkan para pembaca untuk memahami kondisi pekerja pada masa pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1870-1942.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji karya tertulis berupa dokumen tertulis termasuk hasil penelitian yang termuat dalam artikel jurnal yang dapat mendukung dalam proses penelitian (Agung, 1992). Peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan sehingga dalam pencarian data peneliti dapat menemukan informasi yang diperlukan untuk mendukung penelitiannya. Riset pustaka memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Zed, 2008).

Peneliti memilih berbagai macam sumber yang telah disediakan di perpustakaan dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti harus cermat dalam memilih sumber-sumber yang akan digunakan sebagai rujukan. Peneliti harus melakukan kritik ekstern dan intern untuk memastikan jika sumber acuan yang digunakan benar-benar memiliki kredibilitas dari sisi penulis dan orisinalitas dari sisi tulisan. Sehingga karya yang dihasilkan memiliki kualitas dan kuantitas yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Peneliti memerlukan studi pustaka dalam rangka mendapatkan informasi yang diinginkan sehingga dapat dengan mudah memecahkan atau mencari solusi untuk masalah yang sedang diteliti. Setelah peneliti memperoleh data peneliti merangkum inti tulisan (*annotated bibliography*) (Indriati, 2005). Kegiatan mencatat dilakukan oleh peneliti untuk mempermudah mengingat data yang ditemukan dan apabila kekurangan data akan mudah menemukan sumber yang sama. Sehingga peneliti ketika menuliskan sumber diharapkan menuliskan data dengan lengkap, data ini menyangkut (judul, penulis, tahun terbit, dan lain-lain). Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan aspek kronologis, otentitas, dan tematis. Proses klasifikasi dibutuhkan peneliti untuk pengecekan tentang keabsahan dan kredibilitas data yang dibutuhkan sampai proses penafsiran.

Posisi Pekerja Pada Masa Politik Liberal

Pekerja pada masa diterapkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 bertransformasi dari pekerja yang bekerja rodi berubah menjadi pekerja yang sifatnya kontrak. Semua ini tidak lepas dari politik kolonial baru yang berusaha memberikan kebebasan kepada pemodal swasta asing untuk menanamkan modalnya ke Nusantara. Masuknya pemodal ke Nusantara berdampak pada pengembangan industri dan perkebunan baru serta bertambahnya eksploitasi tenaga rakyat. Permasalahan yang muncul sebagai akibat dari pengembangan industri dan perkebunan berupa sulitnya mencari tenaga kerja atau buruh. Kesulitan yang dialami disebabkan keengganan buruh untuk bekerja, karena upah diberikan sangat murah kepada para pekerja. Dampaknya jarang rakyat yang bersedia bekerja di perkebunan milik swasta asing. Kesulitan dalam mencari pekerja tidak berlaku untuk semua daerah di Nusantara (Daliman, 2012).

Kesulitan pemerintah dalam mencari pekerja berlaku di daerah luar Pulau Jawa.

Rata-rata penduduk Jawa bersedia bekerja kepada pemerintah meskipun diberi upah sedikit, tetapi ini tidak berlaku di Sumatra Timur. Penduduk Jawa diberi upah sedikit tetap bekerja karena mereka melakukan pekerjaan tersebut untuk pemenuhan nafkah dan masih ada sedikit ikatan dengan pejabat desa yang memaksa mereka untuk bekerja (Breman, 1986). Sementara penduduk Sumatra Timur memberikan argumen jika keenggannya untuk bekerja karena jumlah penduduknya sedikit dan perkebunannya sangat luas, apabila mereka bekerja menjadi pekerja tetap maka kesejahteraan ekonomi sulit diterima. Alasan sedikitnya upah yang diterima juga merupakan faktor keengganan penduduk Sumatra Timur bekerja di perkebunan Deli. Masalah pekerja di Sumatra Timur ternyata memaksa pemerintah mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mengingat perkebunan tembakau membutuhkan tenaga kerja yang banyak (Daliman, 2012).

Guna mengatasi permasalahan sulitnya mendapatkan tenaga kerja, pemerintah Kolonial Belanda mencari alternatif dengan mendatangkan kuli (pekerja) dari luar Sumatra dan luar negeri. Pemerintah memilih pekerja dari Jawa dan negara Cina. Pada tahun-tahun pertama pengusaha menarik para pekerja dari Jawa melalui *Deli Maatschappij* atau sering disebut *Werek Deli* (agen tenaga kerja). Dalam mencari pekerja werek melakukan berbagai upaya, dengan cara tipuan ataupun membujuk calon pekerja yang diincarnya. Sebagai contoh, para calon pekerja diajak oleh werek pergi menonton wayang, kemudian mereka disandera dan dikirim ke Sumatra Timur (Sairin, 1993). Para werek rela melakukan berbagai upaya yang buruk seperti penyanderaan karena dorongan bayaran yang tinggi. Para werek menerima bayaran sebesar 266 hari gaji para pekerja di Jawa. Para pekerja saat itu menerima gaji sebesar 30 sen gulden sehari (Sairin, 1993). Jika dihitung gaji yang diterima werek sebesar

7980 sen gulden. Pemerintah Belanda juga memanfaatkan para pekerja lama yang pulang ke Jawa untuk mengajak pekerja baru untuk didatangkan ke Sumatra Timur.

Guna mendatangkan pekerja dari Cina pemerintah Belanda juga menggunakan agen seperti rekrutmen pekerja Jawa. Pekerja Cina didatangkan dari Penang dan Singapura melalui perantara-perantara (*Broker*) atau *kheh-thau* (perantara khusus) Cina. Usaha mendatangkan pekerja dari Cina ke Sumatra Timur berhasil. Terhitung sejak dibukanya perkebunan tembakau di Deli untuk pemodal asing pada tahun 1871 berhasil mempekerjakan 3.000 pekerja yang di dominasi oleh Cina. Meskipun demikian, usaha mendatangkan pekerja melalui jasa perantara dinilai membutuhkan biaya yang mahal oleh pemerintah Kolonial Belanda. Akibat kesulitan tersebut para pengusaha di Deli memiliki alternatif untuk mencari pekerja langsung ke negeri Cina (Ismain, 1999).

Sejak tahun 1879 para pengusaha perkebunan di Sumatra Timur telah bergabung dengan perkumpulan pengusaha-pengusaha perkebunan Deli (DPV atau *Deli Planters Vereniging*) tujuan dibentuknya perkumpulan para pengusaha perkebunan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha, salah satunya tenaga kerja. Dalam rangka mengurus tenaga kerja DPV pada tahun 1888 mendirikan biro imigrasi yang mengurus seleksi secara langsung penetapan para pekerja dari Cina dan juga mengurus pengangkutan tenaga pekerja dari Cina ke Sumatra Timur. Peranan DPV lainnya yang tidak kalah penting mengurus pembagian pekerjaan di perkebunan. Peran DPV sebagai biro imigrasi menunjukkan perkembangan yang signifikan. Tercatat pada tahun 1889 jumlah pekerja Cina yang telah masuk ke Nusantara berada pada kisaran 5.167 dan bertambah lagi pada tahun 1890 menjadi 6.666 (Tim Nasional Penulisan Sejarah, 2010a).

Pekerja perkebunan Sumatra Timur yang didatangkan dari Cina bekerja dengan sistem kontrak. Mengutip pendapat Mint dalam (Tim Nasional Penulisan Sejarah, 2010a) sistem kerja kontrak merupakan “suatu sistem dimana pihak majikan membayar biaya pengangkutan pekerja-pekerja dari tempat asal mereka ke tempat pekerjaan, sedangkan para pekerja mengikat diri bekerja untuk masa beberapa tahun dengan upah tertentu”. Melihat mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha untuk mendatangkan para pekerja ke Sumatra Timur membuat organisasi perkebunan mengeluarkan kebijakan jika calon-calon pekerja diwajibkan untuk menandatangani kontrak kerja terlebih dahulu sebelum resmi dipekerjakan di perkebunan. Semua ini dilakukan untuk menjamin rasa aman para pekerja dapat bekerja sesuai waktu yang telah ditentukan. Rata-rata pekerja Cina yang didatangkan ke Nusantara laki-laki, sangat jarang pekerja perempuannya. Pekerja perempuan yang banyak berasal dari Jawa.

Pada tahun 1888, pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan sebuah peraturan. Dalam peraturan tersebut memuat mengenai persyaratan hubungan antara kerja kuli kontrak di Sumatra Timur yang dikenal dengan *koeli ordonnantie*. Mengutip pendapat Daliman (2012) “*koeli ordonantie* merupakan bentuk aturan yang menyangkut hubungan majikan dengan kuli kontrak”. Implementasi dari aturan tersebut mengikat diantara kedua pihak. Pada sisi majikan, memberikan jaminan-jaminan tertentu apabila pekerja melarikan diri sebelum kontraknya habis. Sementara pada sisi kuli (pekerja) melindunginya dari tindakan sewenang-wenang majikan. Dalam prakteknya aturan ini lebih memihak pada majikan. Para pekerja tetap yang paling banyak menerima hukuman.

Koeli ordonatie lebih memiliki hubungan pada sistem upah. Pada saat

peraturan tersebut diterapkan upah yang diterima pekerja sebesar 6 dollar per bulan bagi pekerja laki-laki. Jika dikurskan 1 dollar setara dengan 2 gulden, jadi 12 gulden gaji yang diterima oleh pekerja. Kemudian nilai dolar mengalami penurunan, 1 dollar setara dengan 1.10 gulden, jadi para pekerja laki-laki menerima upah sebesar 4.40 dollar. Sementara pekerja perempuan menerima upah separo dari upah yang diterima pekerja laki-laki. Jadi gaji mereka sebesar 2.20 dollar (Rosidah, 2012).

Penerapan *koeli ordonatie* diikuti dengan ancaman hukuman yang diarahkan kepada para pekerja yang melanggar ketentuan kontrak kerja lebih dikenal istilah *poenalie sanctie*. Mengutip pendapat Daliman (2012) “*poenalie sanctie* merupakan hukuman keras yang diberikan kepada para pekerja yang tidak bersedia bekerja atau melarikan diri dari tempat bekerja”. Bagi para pekerja yang melarikan diri akan dicari oleh polisi. Nama-nama para pekerja juga dicantumkan dalam pamflet untuk disebar dan mereka masuk sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang). Para pekerja yang berhasil ditangkap mereka akan dikembalikan di tempat kerjanya. Pekerja yang berani melakukan perlawanan akan diberi kekerasan oleh polisi. Hukuman lain yang biasa diterima berupa perpanjangan masa kerja tetapi mereka tidak diberi upah.

Penerapan *poenalie sanctie* pada awalnya hanya di Sumatra Timur. Perkembangannya berikutnya aturan tersebut diterapkan untuk semua perkebunan yang terletak di luar pulau Jawa. *Poenalie sanctie* sangat memperkuat kedudukan para pengusaha perkebunan. Keberadaan para pengusaha tidak ada yang mengawasi, membuat keadaan para pekerja menjadi sangat menyedihkan. Guna menahan para pekerja selain diterapkannya *poenalie sanctie* para majikan memberikan kesempatan kepada

para pekerja untuk bermain judi saat menerima gaji. Cara para pengusaha menjerat para berhasil. Para pekerja yang kalah dalam judi mereka akan terjatuh dalam hutang yang besar. Guna melunasi hutangnya para pekerja harus bekerja untuk mendapatkan uang. Konsekuensinya bagi para pekerja harus menandatangani kontrak baru dengan para pengusaha (Tim Nasional Penulisan Sejarah, 2010a).

Pada akhir abad 19 akhir, terdapat salah satu tulisan yang menarik dari seorang pengacara Belanda bernama Van Den Brand. Dalam tulisannya yang berjudul *De Millionen van Deli* (Jutaan dari Deli) disebutkan jika kondisi rakyat Deli yang sangat memprihatinkan. Van Den Brand menggambarkan kondisi pekerja yang bekerja di Sumatra Timur buruk sekali, bahkan disamakan seperti perbudakan. Tulisan dari Van Den Brand menimbulkan kemarahan besar bagi masyarakat Belanda. Banyak masyarakat Belanda yang melakukan protes terhadap perlakuan para pengusaha terhadap para pekerja. Protes yang dilakukan masyarakat Belanda membuat pemerintah Kolonial mulai berusaha mengadakan perbaikan keadaan lingkungan kerja di Sumatra Timur. Secara lambat usaha untuk perbaikan para pekerja berhasil pada abad 20 (Daliman, 2012).

Gerak Transformasi Buruh

Abad 20 merupakan era perubahan politik kolonial di Nusantara. Keprihatinan kaum humanis terhadap nasib kaum Bumiputra membuat pemerintah Kolonial Belanda menerapkan kebijakan politik balas budi atau yang dikenal dengan Politik Etis. Tokoh pelopor Politik Etis diantaranya Van Deventer, Van Kol. C. Th, dan P. Brooschooft. Para kaum humanis seperti Van Deventer memiliki anggapan jika daerah jajahan bukan untuk terus diambil hasilnya tetapi juga harus mengusahakan kesejahteraan bagi rakyatnya (Tim Nasional Penulisan

Sejarah, 2010b). Dengan demikian kebijakan mengenai daerah jajahan menjadi berubah. Beberapa kebijakan baru diterapkan, misalnya program emigrasi, edukasi, dan politik kemakmuran. Penetapan kebijakan baru mempengaruhi kehidupan masyarakat Bumiputra dalam konteks waktu tersebut. Salah satu buktinya munculnya berbagai organisasi politik dan kesadaran rakyat untuk merdeka.

Organisasi politik yang muncul pada awal abad 20 sebagai konsekuensi dari perubahan fungsi daerah jajahan menurut pemerintah kolonial. Sejak awal mobilisasi pekerja merupakan prioritas besar dari organisasi politik maupun sarakat pekerja. Berawal dari terbentuknya *Indische Bond* pada tahun 1899, organisasi yang menjadi wadah bagi pekerja Indo dalam berbagai bidang seperti pekerja kantor pos, pegawai kereta api, dan kantor pajak. Para pekerja memberanikan diri menentang kondisi kerja yang buruk dengan upah rendah dan jam kerja yang panjang. Walaupun sebegitua besar anggotanya masih keberatan menerima anggota dari kalangan Bumiputra (Saptari, 2013).

Tahun 1906 didirikan *Staatspoorbond*, tetapi permasalahan mengenai keanggotaan kembali muncul. Terjadi perdebatan mengenai pemilihan anggota. Perbedaan terjadi mengenai penerimaan pekerja Bumiputra. Pada kesempatan ini keanggotaan pekerja Bumiputra mendapatkan jatah yang lebih banyak dibandingkan pada organisasi *Indische Bond*. Hal tersebut dibuktikan dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung banyak dipakai oleh para pekerja. Walaupun demikian posisi orang-orang Bumiputra belum bisa mendapatkan haknya untuk menentukan pimpinan dalam organisasi tersebut. Dua tahun berikutnya, berdiri VSTP (*Vereeniging voor Spooren Tramweg Personeel*) di Semarang. VSTP merupakan perkumpulan sarakat buruh pekerja kereta api.

Keanggotaan VSTP pada awal berdiri berjumlah 200 orang Eropa dan 10 orang Bumiputra (Saptari, 2013). Pada akhir 1913 VSTP memiliki anggota sebanyak 1.242 orang (673 Eropa dan 569 Bumiputra), pada Januari 1915 beranggotakan 2.292 dan anggota bumiputra telah mencapai 1.439 orang, pada Januari 1917 VSTP mencapai 4.915 orang (837 Eropa dan 4078 Bumiputra) (Novita, 2015). Jika dilihat terjadi transformasi jumlah keanggotaan dalam tubuh VSTP dari awal berdiri sampai periode 1917. Jumlah pekerja Bumiputra pada tahun 1917 naik hampir empat kali lipat dari jumlah pekerja Eropa. Naiknya jumlah pekerja bumiputra didorong oleh pengaruh Sneevlit yang berideologi sosialis-komunis.

Sneevlit memberikan pengaruh yang besar terhadap sifat keanggotaan dalam tubuh VSTP. Buruh bumiputra diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam sarakat buruh. Rapat VSTP yang diselenggarakan pada Februari 1914 memutuskan memberikan jatah tiga dari tujuh posisi eksekutif untuk golongan Bumiputra. Ini sebagai tanda awal tahap perkembangan VSTP dan perubahan struktur dalam tubuh Sarekat buruh yang dikontrol oleh golongan bumiputra (Novita, 2015). Pergerakan kaum buruh di Semarang semakin hidup ketika Semaun datang pada tahun 1916. Ia dikenal sebagai tokoh penggerak kaum revolusioner yang menganut ajaran marxis. Semaun dipilih untuk menjadi pemimpin VSTP pada tanggal 26 Mei 1919 menggantikan H.W Dekker. Pada tahun yang sama, Semaun berperan dalam pendirian sarakat buruh pelabuhan di Semarang yang bernama *Havenaarbeidersbond*, yang kemudian tahun 1924 berganti nama menjadi Serikat Laut dan Gudang (Serilagu). Pendirian beberapa sarakat buruh tersebut jika dilihat dari kacamata politik merupakan mesin penggerak Semaun untuk menjalankan misi komunisme.

Perkembangan sarakat buruh di Semarang tidak bisa dilepaskan dari faktor komunisme dan meningkatnya arus urbanisasi. Ingelson (1981) menyatakan bahwa sejak tahun 1916 telah terjadi proses industrialisasi di Jawa, munculnya industri batik di Solo dan Yogyakarta, industri percetakan, industri baja telah menarik para pekerja dari desa untuk pindah ke kota-kota besar. Semarang merupakan salah satu dari tiga kota yaitu Batavia dan Surabaya yang menjadi roda penggerak bagi kegiatan ekonomi Belanda. Arus urbanisasi berdampak pada bertambahnya jumlah buruh. Kondisi tersebut dapat menjadi ladang subur bagi perkembangannya revolusioner kiri. Dengan menunggangi Sarekat Buruh, kaum revolusioner melakukan aksi-aksi pemogokan.

Secara bergelombang aksi pemogokan buruh dimulai pada tanggal 21 Januari 1922 ketika para pegawai bumiputra di kantor pegadaian Mlaten, Poncol, Karang Turi melakukan pemogokan akibat tuntutan perbaikan gaji dan persoalan harga diri. Satu hari sebelum pemogokan terjadi insiden antara pegawai pegadaian Karang Turi dengan *beheerder* (Kepala Pegadaian). Pada saat itu, pegawai pegadaian diperintah oleh *beheerder* untuk mengangkat barang-barang ke tempat pelelangan, tetapi perintah tersebut ditolak oleh pegawai pegadaian. Peristiwa tersebut memicu perselisihan diantara *berheerder* dengan pegawai pegadaian yang berakibat pada pecahnya aksi pemogokan. Penolakan yang dilakukan para pegawai pegadaian tidak secara serta merta tanpa adanya dasar. Sebenarnya sejak tahun 1919 telah dikeluarkan aturan tentang pengangkatan barang yang dilakukan oleh tukang kebun (Yuliati, 2012). Sebagai akibat dari keputusan penghematan anggaran belanja negara, pemerintah melakukan pemecatan terhadap para petugas pengangkat barang dan tugasnya dilimpahkan terhadap pegawai.

Dari peristiwa pemogokan di pegadaian Mlaten, Poncol, dan Karang Turi, memunculkan semangat penyebarluasan anjuran bagi seluruh kaum buruh di Hindia Belanda untuk berpartisipasi memberikan dukungan baik dalam bentuk uang dan tenaga. Melalui harian Sinar Hindia disiarkan suatu iklan lowongan pekerjaan di pegadaian guna menarik masa. Masa yang telah terkumpul kemudian melakukan aksi pemogokan. Yuliati (2012) mengatakan bahwa telah terjadi pemogokan sebanyak 75 kantor pegadaian yang meliputi Karangturi, Poncol dan Depok di Semarang. Pemogokan para pegawai pegadaian nantinya mampu menginspirasi pemogokan para Sarekat Buruh Kereta Api di Jawa tahun 1923.

Pada tahun 1923 terjadi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Sarekat Buruh Kereta Api (VSTP) melakukan pemogokan. Awalnya terjadi tuntutan dari para buruh kepada pimpinan *staatsspor* menyangkut masalah nasib mereka. Melalui Semaun selaku tokoh yang dianggap pemimpin para buruh menemui *staatsspor* guna membicarakan masalah tunjangan kemahalan bagi para buruh, jumlah jam kerja yakni 8 jam per hari, pembentukan dewan pendamai dan upah minimum sebesar f. 1, per hari (Yuliati, 2012). Khusus mengenai upah buruh, perbandingan antara buruh di Jawa dengan buruh di Deli memang sangat berbeda. Buruh di Deli pada periode 1920-an menerima gaji dua minggu sekali. Para pekerja perkebunan menerima gaji besar dan gaji kecil serta tunjangan natura seperti tekstil. Pada saat menerima gaji besar para pekerja bisa dipandang sebagai hari pesta. Hal ini terjadi karena biasanya pada hari Sabtu daerah perkebunan menjadi seperti pasar. Perkebunan dipenuhi dengan pedagang yang menjajakan dagangannya seperti pakaian dan mainan. Biasanya para pekerja membelikan uangnya untuk keperluan sehari-hari (Sairin, 1993). Berbeda sekali dengan buruh di Jawa yang mengalami eksploitasi tenaga kerja. Mereka

dituntut bekerja 10 sampai 12 jam sehari, serta upah yang kurang dari f.14 per dua minggu (Novita, 2015). Dengan demikian bisa disimpulkan jika kecenderungan buruh di Jawa melakukan aksi-aksi pemogokan disebabkan faktor kesejahteraan yang masih rendah. Terlihat dari upaya eksploitasi jam kerja yang tinggi tapi belum diikuti dengan upah yang setara.

Depresi Ekonomi dan Perubahan Posisi Pekerja

Pada tahun 1930 bisa dibilang pemerintah Kolonial Belanda mengalami masa yang sulit. Kegiatan ekonomi mengalami penurunan, kegiatan ekspor yang menjadi tumpuan ekonomi Belanda mengalami penyusutan secara besar-besaran. Komoditi ekspor seperti gula mengalami guncangan akibat lesunya kegiatan ekspor. Dampaknya semakin meluas hingga bidang jasa yang melayani komoditi ekspor, misalnya perkereta-apian, pelabuhan, dan jasa ekspor sangat menderita. Keadaan yang tidak menentu membuat perubahan drastis ekonomi pemerintah Kolonial Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda dihadapkan pada persoalan cara untuk menggerakkan roda ekonomi dalam kondisi depresi.

Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang logis berupa penghematan dan pengorganisasian kembali dan keputusan Putus Hubungan Kerja (PHK) bagi kaum pekerja. Walaupun tidak semua pekerja mengalami PHK. Para pemodal memiliki alasan jika pekerja yang di PHK merupakan mereka yang kurang terampil dalam pekerjaannya. Para pekerja yang ada di Surabaya memiliki nasib agak lebih baik, para pekerja hanya mengalami penurunan upah. Hal ini seperti digambarkan oleh Dick dalam Saptari (2013) “para pekerja yang bekerja di sektor formal mengalami penurunan upah”. Penurunan upah diikuti dengan penurunan harga barang domestik. Penurunan upah buruh tidak begitu berdampak terhadap

kesejahteraan buruh. Harga barang domestik yang turun tetap bisa dijangkau oleh para buruh dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, harga bahan pangan ikut turun. Para buruh tetap bisa makan. Jadi permasalahan yang muncul di Surabaya tidak begitu berat.

Situasi krisis membuat pemerintah mencari solusi untuk mengatasi masalah pekerja yang putus hubungan kerja. Solusi pertama yang diberikan dengan membentuk komite-komite yang ditugaskan untuk mengurus para pekerja yang menganggur. Komite-komite tersebut berkuat pada kegiatan mengumpulkan dana yang akan diberikan kepada para pekerja, komite-komite juga mengumpulkan dan membagikan pakaian. Komite-komite tersebut juga mendirikan tempat pelatihan dan usaha-usaha kecil yang diperuntukan bagi para pekerja agar bisa membuka kerja baru. Pemerintah juga menyediakan dana penolong, tetapi dana tersebut paling banyak diberikan kepada orang Eropa. Salah satu buktinya di industri gula, tercatat 7.644 bekas pekerja Eropa mendapat dana penolong dan hanya 700 pekerja Bumiputra yang mendapat dana penolong. Jadi dapat disimpulkan pada masa depresi ekonomi terjadi perubahan nasib pekerja, yang semula pekerja mendapat upah tinggi dalam bekerja, kemudian mengalami penurunan upah akibat kebijakan penghematan ekonomi.

Konservatisme Gerakan Pekerja

Dalam kondisi ekonomi yang mengalami depresi membuat para pekerja mencari berbagai macam cara dalam mempertahankan hidupnya. Timbul kekhawatiran diantara pekerja jika kondisi ekonomi yang sedang surut membuat mereka mengalami ancaman pemecatan dan kehilangan pekerjaan. Masalah kebimbangan akibat merosotnya ekonomi tidak hanya dialami oleh para pekerja. Hal ini juga dialami

pula oleh pemerintah Kolonial Belanda dan pihak pengusaha. Pemerintah Kolonial Belanda khawatir jika kondisi ekonomi yang memburuk akan berdampak pada ketiastabilan politik. Bagi para pengusaha kekhawatiran muncul jika secara tiba-tiba muncul goncangan sosial. Terutama yang paling menjadi perhatian adalah pergerakan kaum baru.

Nasib pekerja pada masa depresi ekonomi serba tidak jelas. Melihat kondisi demikian, muncul beberapa pihak yang ikut prihatin dengan kondisi pekerja. Sarekat Sekerja misalnya mengupayakan pengumpulan dana untuk diberikan kepada para pekerja. Dana yang dihimpun akan digunakan untuk membuka lahan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebagaimana lagi dananya dimanfaatkan untuk membuka pelatihan bagi para petani supaya tetap bisa bertahan di sektor pertanian. Berbeda dengan di Surabaya, Dr Soetomo memunculkan gagasan untuk mendirikan koperasi-koperasi. Dr Soetomo memiliki pandangan jika solusi terbaik untuk mengatasi masalah pekerja dengan mengarahkan pekerja pada usaha-usaha ekonomi. Pandangan Soetomo muncul karena ia melihat pada fase sebelumnya banyak kaum pekerja yang bersentuhan dengan urusan politis. Ketika politik bersatu dengan ekonomi maka sulit untuk pekerja mencapai kesejahteraan. Pekerja akan terpecah konsentrasinya dalam bekerja (Saptari, 2013).

Di pihak lain, momentum depresi ekonomi dimanfaatkan oleh organisasi politik untuk menyerukan persatuan, menentang pemecatan dan pengurangan penghasilan. Organisasi Komite Pembela Kesengsaraan Boeroeh Perempuan Indonesia (CKPBPI) telah menunjukkan bukti jika dalam menghadapi depresi ekonomi banyak pekerja perempuan yang memperoleh penghasilan sampingan dari pelacuran. Hal ini selaras

dengan berita yang di muat oleh Soera Soerabaya yang dikutip oleh Saptari (2013) kondisi pekerja pada masa depresi ekonomi sangat buruk, contohnya di Lasem terjadi kekerasan sosial di tempat kerja. Dari beberapa bukti tersebut organisasi politik menyorakan keras pentingnya nasionalisme. Mereka mencoba menekankan identitas kebangsaan. Misalnya Perserikatan Pegawai Pegadaian Hindia (PPPH) berubah namanya menjadi (PPPB) Perserikatan Pegawai Pegadaian Boemiputra. Jadi dapat disimpulkan, jika dalam menghadapi kondisi depresi ekonomi para pekerja mencoba bertahan dengan berbagai cara mulai dari yang jadi pelacur sampai mengikuti pelatihan kerja.

Simpulan

Masa pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia yang sangat lama melahirkan bermacam-macam kebijakan terhadap daerah jajahan. Setiap penerapan kebijakan tentunya membawa konsekuensi terhadap sektor-sektor kehidupan masyarakat Bumiputra. Salah satu sektor yang terkena pengaruh adalah pekerja. Posisi pekerja pada masa Tanam Paksa, Politik Liberal, Politik Etis berbeda. Jika pada masa tanam paksa pekerja dipekerjakan secara paksa sehingga masa Tanam Paksa dikenal sebagai pewaris pekerja yang murah. Berbeda dengan masa Politik Liberal, pekerja mulai mendapatkan upah yang lebih tinggi dan diperkenalkannya sistem kuli kontrak. Keberadaan pekerja semakin berkembang semakin berkembang pada masa politik etis. Transformasi politik mengakibatkan posisi pekerja menjadi organisasi yang dianggap penting. Para pekerja mulai berani menyuarakan dirinya yang menuntut kelayakan penghidupan. Dengan melihat sejarah pekerja di Indonesia telah terjadi transformasi ke arah yang lebih baik. Semoga dengan perhatian yang lebih dari pemerintah keadaan pekerja di Indonesia sekarang bisa lebih baik dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Agung, I. G. . (1992). *Metode Penelitian Sosial (Pengertian dan Pemakaian Praktis)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Breman, J. (1986). *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*. Jakarta: LP3ES.
- Daliman, A. (2012). *Sejarah Indonesia Abad IX sampai Awal Abad XX*. Yogyakarta: Ombak.
- Indriati, E. (2005). *Menulis Karya Ilmiah: Artikel, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ingelsson, J. (1981). Worker Consciousness and Labour Unions in Colonial Java. *Pacific Affairs*, 54(3), 485–501.
- Iqbal, S. (2011). Pekerja dan Politik. *Jurnal Sosial Demokrasi*, 10(4 Januari-Maret 2011).
- Ismain, K. (1999). *Marginalisasi Golongan Bumiputra Dalam Kemunculan Fenomena Golongan Menengah Timur Asing Di Indonesia Sejak Abad 17*. Malang, Indonesia.
- Novita, A. (2015). Gerakan Sarekat Buruh Semarang. *Jurnal of Indonesia History*, 3(2), 1–7.
- Rosidah. (2012). *Eksplorasi Pekerja Perempuan di Perkebunan Deli Sumatera Timur Tahun 1870-1930*. universitas diponegoro.
- Sairin, S. (1993). Kebijakan Perburuhan di Perkebunan Sumatera Timur pada masa Kolonial. *Simposium Internasional Ilmu-Ilmu Humaniora II Yang Diselenggarakan Oleh Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada 26-27 April 1993*. Yogyakarta.
- Saptari, R. (2013). *Bangsa dan Politik Perpekerjaan Dalam Proses Dekolonisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tim Nasional Penulisan Sejarah, I. (2010a). *Sejarah Nasional Indonesia IV (Kemunculan Penjajahan di Indonesia)* (Soedjono & R. . Leirissa, Eds.). Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Nasional Penulisan Sejarah, I. (2010b). *Sejarah Nasional Indonesia V (Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda)* (Soejono & R. . Leirissa, Eds.). Jakarta: Balai Pustaka.

- Yuliati, D. (2012). Nasionalisme Pekerja Dalam Sejarah Indonesia. *Jurnal Humanika*, 16(No 9 Desember).
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.